ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KENDARI

Oleh :
Husin[1], Nur Asni[2], Kiki Fatimah Sarita[3]
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo
Kendari, Sulawesi Tenggara

ABSTRACT

This Research aims to determine the level of effectiveness and contribution of Building and land Tax and customs revenue of Land rights and Building on local revenue in kendari district. The research uses the method of analysis contribution and analysis effectiveness. The method of Data collection used is the method of documentation the data taken during the period of four years, from 2012 until 2015. The data was obtained from the Revenue Office district native regions kendari.

The results of this research show that: 1) The level of effectiveness acceptance land and building tax at the Revenue Office district reached an average of 56.35% with a value criterion of interpretation Ineffective. The level of effectiveness customs revenue of Land rights and Building at the Revenue Office district reached an average of 80.51% with a value criterion interpretation Effective Enough. 2.) The level of the land and building tax contribution to the local revenue in kendari ditrict, which is an average contribution of 8.68% with the contribution criteria Very Less contribute to the PAD, and the rest from other local taxes. The level of customs revenue of Land rights and Building contribution to the local revenue in kendari district, which is an average contribution of 9.77% with the contribution criteria are lacking, and the rest from other local taxes.

Keywords: Land and Building Tax, customs revenue of Land rights and Building, Local Revenue Kendari district

I. PENDAHULUAN

Istilah pembangunan nasional sudah dikenal di Indonesia. Pembangunan nasional di Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Untuk dapat merealisasikan pembangunan itu diperlukan dana yang sangat besar. Salah satunya, diperoleh dari pajak. Salah satu jenis pajak yang penerimaannya sangat potensial adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dapat memberikan peran penting dalam pembangunan. Pada awalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikelola Pemerintah Pusat, tetapi kini diserahkan ke Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengalihan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dilaksanakan mulai 1 Januari 2011 dan pengalihan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan perkotaan dilaksanakan ke seluruh pemerintahan kabupaten/kota dimulai paling lambat 1 Januari 2014. Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) membawa banyak perubahan. Dengan pengalihan ini, penerimaan PBB-P2 dan BPHTB akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota sehingga diharapkan mempu meningkatkan jumlah

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan mengenai tingkat pencapaian dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari, maka dapat disimpulkan bahwa : 1) Tingkat efektifitas penerimaan PBB pada Dinas Pendapatan Daerah rata rata mencapai 56,35 % dengan kriteria nilai interpretasi Tidak Efektif. Tingkat efektifitas penerimaan BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah rata -rata mencapai 80,51 % dengan kriteria nilai interpretasi Cukup Efektif. 2) Tingkat kontribusi PBB terhadap PAD Kota Kendari, yaitu rata-rata kontribusinya sebesar 8,68 % dengan kriteria kontribusi Sangat Kurang berkontribusi terhadap PAD, dan sisanya dari pajak daerah lainnya. Tingkat kontribusi BPHTB terhadap PAD Kota Kendari, yaitu rata-rata kontribusinya sebesar 9,77 % dengan kriteria kontribusi sangat kurang, dan sisanya dari pajak daerah lainnya.

Adapun saran yang diberikan peneliti, antara lain : 1) Diharapkan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari lebih meningkatkan lagi potensi penerimaan PBB dan BPHTB agar lebih efektif dalam mencapai target yang ditetapkan untuk tahun berikutnya. 2) Diharapkan bagi Dinas Pedapatan Daerah Kota Kendari kedepannya PBB dan BPHTB dapat semakin besar kontribusinya dalam meningkatkan PAD dan guna kemajuan pembangunan daerah Kota Kendari. 3) Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan melakukan penelitian sejenis lebih lanjut untuk mengetahui kontribusi PBB dan BPHTB saat dikelola Pemerintah Daerah terhadap PAD, sehingga dapat ditemukan hasil yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Abdillah Hermansyah. 2015. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Dispenda Kota makassar. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: AMP YKPN.

Henny Ongko Mulyo. 2013. Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. *Skripsi*. Bandung: Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: Andi.

Marihot P. Siahaan. 2009. *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia. Teori dan Praktik.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Nurwulan, Rindi Septi Coriah (2008). Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon). *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Widyatama. (tidak dipublikasikan).

Resmi, Siti. (2008). *Perpajakan: Teori dan Kasus,* Salemba Empat, Yogyakarta.

Sherra Emaretha. 2008. Analisis Pengaruh Pelaksanaan Pemungutan BPHTB dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan BPHTB. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Suandy, Erly. 2002. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*